

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada peserta PBPU di wilayah Kota Kediri tentang faktor yang berhubungan dengan kepatuhan membayar iuran JKN pada peserta PBPU di wilayah Kota Kediri, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak ada hubungan pendidikan dengan kepatuhan membayar iuran JKN pada peserta PBPU di wilayah Kota Kediri
2. Tidak ada hubungan pekerjaan dengan kepatuhan membayar iuran JKN pada peserta PBPU di wilayah Kota Kediri
3. Terdapat hubungan pendapatan dengan kepatuhan membayar iuran JKN pada peserta PBPU di wilayah Kota Kediri
4. Tidak ada hubungan pengetahuan dengan kepatuhan membayar iuran JKN pada peserta PBPU di wilayah Kota Kediri
5. Terdapat hubungan persepsi dengan kepatuhan membayar iuran JKN pada peserta PBPU di wilayah Kota Kediri

#### **5.2 Saran**

1. Bagi BPJS Kesehatan
  - Agar BPJS Kesehatan meningkatkan sosialisasi terkait program JKN untuk meningkatkan pengetahuan tentang hak dan kewajiban peserta. Diharapkan juga memberikan informasi seperti cara menggunakan, cara membayar dan kanal pembayaran yang bekerja sama serta sanksi yang diberikan apabila peserta menunggak iuran.
  - Diharapkan kepada BPJS Kesehatan untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai informasi pembayaran iuran tepat waktu seperti membuat sistem pengingat membayar iuran sebelum tanggal 10 kepada peserta, sehingga peserta dapat membayarkan iuran tepat waktu misalnya melalui sms dan sebagainya.

## 2. Bagi Peserta

- Agar peserta meningkatkan informasi melalui media-media yang sudah digunakan BPJS Kesehatan seperti brosur dan media sosial.
- Peserta diharapkan untuk menjaga komitmen membayar iuran tepat waktu setiap bulannya, karena ketika telah menjadi peserta PBPJ JKN maka seseorang telah mampu dan mau untuk membayar iuran.

## 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan menambah variabel lain yang akan berhubungan terhadap tingkat kepatuhan peserta PBPJ dalam membayar iuran JKN.

## 4. Bagi Pemerintah

Diharapkan Perangkat Desa melakukan pendataan kembali secara baik dengan mengutamakan masyarakat yang tidak mampu (dengan berpendapatan rendah dan memiliki jumlah anggota besar) agar masuk ke dalam jaminan kesehatan yang ditanggung pemerintah/PBI.